
Kepentingan Amerika Serikat Dalam Pengakuan Yerusalem Sebagai Ibukota Israel Tahun 2017

Silvi Oktaviani¹

¹Direktorat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Telkom University
Jl. Telekomunikasi No.1, Terusan Buah Batu - Bandung, Indonesia

Email : oktavsisil@gmail.com

Abstract

This study aims to describe the national interest of the United States in recognizing Jerusalem as Israel's capital and how the impact of the recognition. The status of the city of Jerusalem itself is under international authority based on the resolution of the UNSC number 181 (1947) and is given a separate body and political status. This resolution also mandates the establishment of an Arab (Palestinian) state and a Jewish state (Israel), both for Palestinian and Israel have independent status.

The National Interest theory is used in this study, this is related to the policies adopted by the United States in the effort to fulfill its national interests. The research method is qualitative. Most of the data collected through library research, observation, documentation and online data retrieval. The research was conducted at the American Embassy for Indonesia in Jakarta and Center for Strategic and International Studies Indonesia in Jakarta.

The results showed that the recognition of Jerusalem as Israel's Capital by the United States is an effort to fulfill the country's national interest, this has an impact on relations between the two countries which are getting closer after the recognition. Under Trump's leadership, for the first time America recognized Jerusalem as the Israel's capital and moved the American embassy from Tel Aviv to Jerusalem. This recognition also received rejection from various international actors.

Keywords— America, Israel, National Interest, Jerusalem

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kepentingan nasional Amerika Serikat dalam mengakui Yerusalem sebagai ibukota Israel serta dampak yang ditimbulkan atas pengakuan tersebut. Status kota Yerusalem sendiri berada dibawah kewenangan internasional berdasarkan resolusi Majelis DK PBB nomor 181 tahun 1947 dan diberikan status hukum dan politik yang terpisah (separated body). Resolusi ini juga memberikan mandat berdirinya negara Arab (Palestina) dan negara Yahudi (Israel) yang masing-masing berstatus merdeka.

Dalam menjelaskan fenomena yang peneliti telaah, peneliti menggunakan teori kepentingan nasional, hal ini terkait dengan kebijakan yang dilakukan Amerika Serikat dalam usaha pemenuhan kepentingan nasionalnya. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Sebagian besar data yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan, observasi, dokumentasi dan penelusuran data online. Penelitian dilakukan di Kedutaan Amerika untuk Indonesia di Jakarta dan pusat kajian kebijakan yaitu Center for Strategic and International Studies Indonesia di Jakarta.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengakuan yang dilakukan Amerika Serikat adalah upaya untuk pemenuhan kepentingan nasional negaranya, hal ini berdampak terhadap hubungan kedua negara yang semakin erat pasca pengakuan tersebut. Dibawah kepemimpinan Trump, untuk pertama kalinya Amerika mengakui Yerusalem sebagai ibukota Israel dan melakukan pemindahan kedutaan Amerika

dari Tel Aviv ke Yerusalem. Pengakuan tersebut pun mendapat penolakan dari berbagai aktor internasional.

Kata kunci—Amerika, Israel, Kepentingan Nasional, Yerusalem

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Pada hakikatnya, hubungan internasional adalah interaksi yang dilakukan antar negara dan antar bukan negara yang bertujuan untuk memenuhi kepentingan nasionalnya atau negaranya yang tidak dapat dipenuhi sendiri. Dalam mencapai kepentingan nasional ini, setiap negara dapat melakukan kerja sama dengan negara lain. Baik kerja sama bilateral, regional maupun multilateral. Salah satu kerja sama yang telah terjalin cukup lama adalah kerja sama antara Amerika Serikat dengan Israel.

Hubungan keduanya bermula pada tahun 1948 ketika Amerika Serikat sebagai negara pertama yang mengakui Israel sebagai sebuah negara. Bahkan dalam situs resmi Amerika Serikat, selain telah menyatakan bahwa Amerika Serikat adalah negara pertama yang mengakui Israel pada tahun 1948, Amerika Serikat pun adalah yang pertama mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel pada tahun 2017. Israel telah lama, dan tetap, mitra paling terpercaya Amerika di Timur Tengah. Israel dan Amerika Serikat terikat erat oleh ikatan sejarah dan budaya serta kepentingan bersama

(<https://www.state.gov/r/pa/ei/bgn/3581.htm>, diakses pada 5 Maret 2019).

Namun, dalam hubungan internasional pemenuhan kepentingan nasional tidak hanya melalui kerja sama. Pada kenyataannya, dalam mencapai tujuan nasional masing-masing negara,

adakalanya muncul konflik yang tidak dapat terelakkan. Konflik dapat terjadi karena perbedaan kepentingan serta perbedaan nilai yang dianut. Perbedaan kepentingan atau kepentingan nasional setiap negara tentu berbeda dan seringkali berbenturan dalam prakteknya.

Salah satu konflik dalam hubungan internasional yang memiliki sejarah panjang adalah perebutan kota suci Yerusalem antara Israel dan Palestina. Status Yerusalem sendiri merupakan masalah paling sensitif dan kontroversial dalam konflik antara Arab dengan Israel. Selain sebagai eksistensi bagi Palestina dan Israel, posisi Yerusalem merupakan tempat yang strategis, seiring dengan keberadaan penduduk yang padat, banyak aset strategis terletak disini, seperti Bandara Ben-Gurion, Pelabuhan Ashdod, pembangkit listrik, markas perbankan, susunan basis data terkomputerisasi, pangkalan militer vital, dan markas utama semua cabang keamanan — IDF, Mossad, dan Layanan Keamanan Umum (<https://jiss.org.il/en/the-strategic-importance-of-jerusalem/> diakses 2 mei 2019).

Menurut data dari UN-OCHA/*United Nation Office for the Coordination of Humanitarian Affairs* (Kantor Koordinasi Urusan Kemanusiaan PBB), setidaknya lebih dari seratus ribu korban terluka dari pihak Palestina dan sebelas ribu dari pihak Israel terhitung dari tahun 2000 hingga saat ini (<https://www.unocha.org/> diakses pada 30 Maret 2019).

Puncak baru permasalahan sengketa terkait status Yerusalem terjadi pada Rabu

6 Desember 2017, ketika Donald Trump, dalam pidatonya di Gedung Putih mengejutkan dunia dengan mendeklarasikan bahwa Yerusalem sebagai Ibukota dari Israel, hal ini dilakukan setelah beberapa hari Donald Trump terpilih sebagai Presiden ke 45 Amerika Serikat. Hal ini mendapat protes keras dari dunia dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dampak yang muncul adalah keputusan tersebut akan memicu terjadinya ketidakstabilan di kawasan Timur Tengah dan mengganggu proses perdamaian antara Israel dan Palestina.

Dibawah kepemimpinan Donald Trump dengan kebijakan *'First America'*nya, Trump menekankan aliansi yang lebih dekat dengan Israel. Untuk itu, Trump bergerak cepat untuk merangkul perdana menteri Israel yang berhaluan keras, Benjamin Netanyahu. Dia mendukung perluasan permukiman Israel di Tepi Barat dan memutuskan untuk memindahkan kedutaan Amerika Serikat ke Yerusalem dari Tel Aviv. Keputusan kedutaan mendapat teguran oleh konsensus internasional yang menyerukan agar status Yerusalem diselesaikan dalam pembicaraan damai dengan Palestina. Ironisnya, Trump tidak menerima konsesi dari Israel sebagai imbalan atas keputusan kedutaannya. Trump bereaksi dengan mengancam akan memotong bantuan ke negara mana pun yang memberikan suara menentang Amerika Serikat (Powaski, 2019 : 240).

Pengakuan kota Yerusalem sebagai ibukota Israel melanggar resolusi Majelis Umum PBB nomor 181 tahun 1947 dimana status Yerusalem adalah wilayah yang berada di bawah kewenangan internasional, dan diberikan status hukum dan politik yang terpisah (*separated body*). Resolusi

ini juga memberikan mandat berdirinya negara Arab (Palestina) dan negara Yahudi (Israel) yang masing-masing berstatus merdeka (UN document, 'Chapter 12: The Status of Jerusalem':9).

Dalam tulisan yang dibuat Anthony H. Cordesman, ketua strategi institut penelitian CSIS/*Center for Strategies and International Studies* "Dampak Strategis Menjadikan Yerusalem Ibukota Israel", menjabarkan bahwa dampak yang ditimbulkan Yerusalem menjadi ibukota Israel membuat populasi Yahudi terus meningkat, dan populasi Palestina di Yerusalem akan terus mendapat tekanan(<https://www.csis.org/analysis/strategic-impact-making-jerusalem-capital-israel> diakses 2 Mei 2019).

Selain itu, dalam buku *The United States in the Middle East*, Michael C. Hudson memaparkan analisis kepentingan Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah, yaitu minyak dan Israel, ketergantungan Amerika Serikat terhadap minyak juga berpengaruh terhadap daya ekonomi Amerika Serikat, minyak sebagai sumber daya yang dibutuhkan dalam memproduksi berbagai produk seperti senjata, bahan bakar, produksi barang dan lainnya.

Bagi Israel sendiri, tujuan kerja sama ini pun untuk keamanan nasional negaranya, Israel yang berada dikawasan Timur Tengah yang berada ditengah negara-negara Arab terancam keamanannya. Banyak pertentangan yang muncul dari negara-negara Arab terkait deklarasi berdirinya sebuah negara Israel, selain itu konflik yang tidak berkesudahan antara Israel dengan Palestina, dimana organisasi Liga Arab dengan negara-negara Arabnya mendukung Palestina dan menentang Israel, yang merupakan

ancaman bagi berdiri dan berdaulatnya negara Israel.

Konflik perebutan kota Yerusalem ini tidak hanya melibatkan antara Israel dan Palestina, namun juga beberapa aktor internasional lainnya ikut terlibat, seperti Amerika Serikat, beberapa negara Arab, Organisasi Regional Liga Arab dan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Babak berikutnya negara-negara Arab masuk dan ikut menyerang Israel yang selanjutnya dikenal dengan perang Arab-Israel yaitu negara-negara Arab seperti Mesir, Lebanon, Jordan, Irak, Suriah, Yaman dan Arab Saudi melawan Israel (Fawcett, 2009:231-233).

Adapun Beberapa penelitian sebelumnya yang terkait dengan tema ini ialah pertama, skripsi karya Imam Kurniawan dari jurusan Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Malang yang berjudul "*Kepentingan Amerika Serikat dalam Invasi Irak tahun 2003*" yang memaparkan serangkaian serangan dan intervensi yang dilakukan oleh Amerika Serikat terhadap Irak dimana Irak diserang secara militer atas dasar tuduhan menyimpan senjata pemusnah massal NUBIKA (Nuklir, Biologi, dan Kimia).

Kedua, skripsi karya Nurlita Aprilinasari dari Universitas Muhammadiyah Malang jurusan Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang berjudul "*Strategi AIPAC (American-Israel Public Affairs Committee) terhadap Kebijakan Luar Negeri AS Era George Walker Bush terkait Konflik Israel dan Palestina*" yang di dalamnya Nurlita memaparkan bagaimana lobby Israel melalui organisasi pro-Israel yaitu AIPAC (American-Israel Public

Affairs Committee) yang merupakan organisasi induk ratusan organisasi Yahudi di Amerika yang memonitor birokrasi Amerika Serikat.

Ketiga, Jurnal volume 1 nomor 1 tahun 2018, dari Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sam Ratulangi karya Melita Angelin Bidara, Michael Mamentu dan Trilke Tulung dengan judul "*Kepentingan Amerika Serikat dalam Konflik Laut China Selatan*" yang berisi intervensi Amerika Serikat dan kepentingannya dalam konflik laut China Selatan.

Keempat, jurnal volume 9 nomor 1 dalam Majalah Ilmiah Unikom, program studi Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik karya Ibu Dewi Triwahyuni dengan judul "*Signifikansi Kawasan Asia Tenggara dalam Kepentingan Amerika Serikat*" dimana berisi uraian kepentingan Amerika Serikat dikawasan Asia Tenggara.

1.2. Rumusan Masalah

1.2.1 Rumusan Masalah Mayor

"Apa kepentingan Amerika Serikat dalam mengakui Yerusalem sebagai Ibukota Israel?"

1.2.2 Rumusan Masalah Minor

1. Apa kepentingan yang didapat Amerika Serikat dengan pengakuan Yerusalem sebagai ibukota Israel?
2. Bagaimana hubungan Amerika Serikat dengan Israel pasca pengakuan Yerusalem sebagai ibukota Israel?
3. Bagaimana reaksi masyarakat internasional terkait pengakuan Yerusalem sebagai ibukota Israel

1.3. Maksud dan Tujuan

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui apa kepentingan nasional Amerika Serikat mengakui Yerusalem sebagai ibukota Israel, keuntungan yang didapatkan, upaya-upaya Amerika Serikat dalam mendukung Israel sebagai ibukota Israel dan bagaimana dampak yang terjadi setelah pengakuan Yerusalem sebagai ibukota Israel.

1.4. Kegunaan Penelitian

Diharapkan dapat menambah wawasan penulis dan memberikan tambahan pembedaharaan pustaka, serta dapat memberikan sedikit sumbangsih bagi Ilmu pengetahuan studi Ilmu Hubungan Internasional, Politik Luar Negeri dan Studi Keamanan Internasional serta memahami sejauh mana dampak yang akan terjadi dari pendeklarasian kota suci Yerusalem sebagai Ibukota Israel.

Diharapkan dapat menambah wawasan dan berguna bagi penulis dan para pembaca penelitian ini. Diharapkan dapat memberikan pemahaman lebih jauh mengenai permasalahan perebutan kota suci Yerusalem oleh tiga agama di kota tersebut.

2. Kajian Pustaka dan Kerangka Pemikiran

2.1 Hubungan internasional

Hubungan internasional pada dasarnya merupakan interaksi antar aktor internasional yang melewati batas negara dengan tujuan pencapaian kepentingan tertentu. Teori hubungan internasional adalah studi hubungan internasional dari sudut pandang teoretis, yang digunakan

untuk memahami dan menganalisis secara tepat terkait fenomena yang sedang terjadi di dunia (Jackson & Sorensen, 2012: 3).

Bagi para penstudi hubungan internasional tradisional, tujuan negara dan *power* tidak dapat dipisahkan, karena tujuan setiap aktor adalah *power* atau kekuasaan. Hal ini selaras dengan pernyataan Arnold Schwarzenberger, yang menyatakan bahwa negara dalam sistem internasional akan melakukan apa yang mereka kuasai secara fisik lebih daripada apa yang seharusnya mereka lakukan secara moral (Perwita & Yani, 2014: 13).

Dapat disimpulkan bahwa tujuan dari hubungan internasional adalah pemenuhan kepentingan nasional yang dipenuhi dari luar dengan cara melakukan kerja sama antar negara. Salah satu contohnya seperti fenomena penelitian yang peneliti sajikan pada tulisan kali ini adalah kepentingan Amerika Serikat terhadap Israel dibawah kepemimpinan Donald Trump.

2.1.1 Hubungan Bilateral

Hubungan bilateral adalah hubungan yang saling mempengaruhi/timbal balik antar dua pihak. Pola-pola yang terbentuk dari proses interaksi, dilihat dari kecenderungan sikap dan tujuan pihak-pihak yang melakukan hubungan timbal balik tersebut dibedakan menjadi pola kerja sama, persaingan dan konflik (Perwita dan Yani, 2014: 42).

Realisasi hubungan bilateral negara diaplikasikan melalui hubungan diplomatik sebagai bentuk hubungan formal antar kedua negara. Bagi negara manapun tujuan utama diplomasinya adalah pengamanan kebebasan politik dan integritas teritorialnya. Ini bisa dicapai dengan memperkuat hubungan dengan negara sahabat, memelihara hubungan erat dengan

negara-negara yang sehaluan dan menetralsir negara yang memusuhi (Jackson & Sorensen, 2009 : 34).

Dapat disimpulkan bahwa hubungan bilateral adalah kerja sama antara kedua belah pihak yang masing-masing pihak memiliki kepentingan untuk pemenuhan nasionalnya. Seperti fenomena yang peneliti kali ini teliti, hubungan antara Amerika Serikat dengan Israel pasti masing-masing pihak memiliki kepentingan untuk dicapai, salah satu caranya adalah kerja sama yang telah lama mereka lakukan.

2.1.2 Kepentingan Nasional

Untuk memahami lebih jauh mengenai hubungan internasional, konsep kepentingan nasional perlu dimengerti agar kita dapat memahami perilaku internasional. Para ahli mengemukakan bahwa “negara bertindak atas kepentingan nasionalnya” hal ini karena kepentingan nasional merupakan formula kebijakan suatu negara terhadap negara lain. Kepentingan nasional ini erat kaitannya dengan unsur-unsur yang membentuk kebutuhan negara yang paling vital, seperti pertahanan, keamanan, militer dan kesejahteraan ekonomi (Plano & Olton dalam perwita & Yani, 2014: 35).

2.1.2.1 Klasifikasi Kepentingan Nasional

Berikut enam klasifikasi kepentingan yang ingin dicapai sebuah negara menurut Thomas W. Robinson:

1. *The Primary Interests* (kepentingan utama sebuah negara yang tidak dapat diganggu gugat oleh negara lain, seperti pelestarian identitas fisik, politik dan budaya).

2. *Secondary Interests* (berada dibawah kepentingan utama, berisi eksistensi sebuah negara yang di dalamnya terdapat perlindungan warga negara di luar negeri dan kekebalan diplomatik bagi staf diplomatic).
3. *Permanent Interests* (kepentingan negara yang relatif konstan dan jangka panjang. Contohnya seperti Amerika Serikat yang telah lama memiliki hubungan dekat dengan Israel).
4. *Variable Interests* (kepentingan di dalam suatu negara yang dianggap vital untuk kebaikan nasional dalam keadaan tertentu. Kepentingan ini dipengaruhi oleh opini publik dan moral yang berlaku saat itu. Contoh ketika kepentingan Amerika Serikat dalam membendung Uni Soviet berhenti pasca berakhirnya perang dingin).
5. *The General Interests* (kepentingan dimana sejumlah besar negara dapat menerapkannya di beberapa bidang tertentu seperti hubungan ekonomi, perdagangan, hubungan diplomatik, dan lain-lain. Contohnya menjaga perdamaian adalah kepentingan umum semua negara).
6. *Specific Interests* (kepentingan yang berasal dari hasil pemikiran logis. Kepentingan yang didefinisikan ke dalam waktu dan tempat. Contohnya

ketika Amerika Serikat membantu negara lain dalam memerangi komunis selama perang dingin (Sharma, 2007: 127-128).

2.1.3 Politik Luar Negeri

Pengertian Politik luar negeri pada dasarnya merupakan kebijaksanaan suatu negara yang ditujukan ke negara lain dalam memperjuangkan kepentingan nasional negaranya (Perwita & Yani, 2014: 47). Dengan demikian, politik luar negeri merupakan suatu arena pertemuan setiap negara untuk pemenuhan kepentingannya masing-masing dengan melakukan kerjasama baik bilateral, regional maupun multilateral.

K.J Holsti memberika tiga kriteria untuk mengklasifikasikan tujuan-tujuan politik luar negeri suatu negara, yaitu:

1. Nilai (values) yang menjadi tujuan dari para pembuat keputusan.
2. Jangka waktu yang dibutuhkan untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan. Dimana terdapat tujuan jangka pendek (short-term), jangka menengah (middle-term) dan jangka panjang (long-term).
3. Tipe tuntutan yang diajukan suatu negara kepada negara lain. (Russet & Starr dalam Perwita & Yani, 2014: 52).

Saat ini, dalam fenomena hubungan internasional untuk menjelaskan politik luar negeri adalah ketika sebuah negara melakukan kemitraan strategis dengan negara lain melalui sebuah kerja sama. Contohnya seperti Amerika Serikat dengan Israel dalam kerja sama bidang kemiliteran, setiap tahun Amerika Serikat selalu

memberi dukungan bantuan dana dalam bidang militer kepada Israel.

2.1.3.1 Kebijakan Politik Luar Negeri

Analisis kebijakan luar negeri adalah kajian manajemen hubungan dan aktivitas eksternal suatu negara. Kebijakan luar negeri melibatkan tujuan, strategi, ukuran, metode, panduan, arahan, perjanjian, dan lain-lain. Pemerintah dapat melakukan hubungan internasional dengan negara-bangsa lain, organisasi internasional, dan organisasi non-pemerintah (Jackson & Sorensen, 2012: 9).

Analisis kebijakan luar negeri melibatkan penelitian tentang proses pembuatan kebijakan luar negeri suatu negara yang turut mempertimbangkan politik internasional dan domestik. Kebijakan luar negeri pula menyertakan studi diplomasi, perang, organisasi antarpemerintah, dan sanksi ekonomi, masing-masing merupakan cara bagi negara untuk menerapkan kebijakan luar negerinya (Garrison, 2003: 155).

2.1.5 Kerangka Pemikiran

Setiap negara tentu memiliki tujuan dan kepentingan nasional yang harus dicapai, untuk itu setiap negara tentunya menjalin kerja sama dengan negara lain. Konsep kepentingan nasional perlu dimengerti agar kita dapat memahami perilaku internasional. Para ahli mengemukakan bahwa “negara bertindak atas kepentingan nasionalnya” hal ini karena kepentingan nasional merupakan formula kebijakan suatu negara terhadap negara lain.

Dibawah kepemimpinan Donald Trump dengan kebijakan ‘*First America*’nya, Trump menekankan aliansi yang lebih dekat dengan Israel dengan

mengakui Yerusalem sebagai Ibukota dari Israel pada Rabu 6 Desember 2017. Dampak yang muncul adalah keputusan tersebut akan memicu terjadinya ketidakstabilan di kawasan Timur Tengah dan mengganggu proses perdamaian antara Israel dan Palestina.

Pengakuan kota Yerusalem sebagai ibukota Israel melanggar resolusi Majelis Umum PBB nomor 181 tahun 1947 dimana status Yerusalem adalah wilayah yang berada di bawah kewenangan internasional, dan diberikan status hukum dan politik yang terpisah (*separated body*). Resolusi ini juga memberikan mandat berdirinya negara Arab (Palestina) dan negara Yahudi (Israel) yang masing-masing berstatus merdeka (UN document, 'Chapter 12: The Status of Jerusalem':9).

Hal ini demi mencapai kepentingan nasional Amerika Serikat, yaitu dalam bidang keamanan, antara lain: pertama, untuk melindungi kepentingan vital dan mengamankan perdamaian; mencegah agresi; mencegah, meredakan, dan mengelola krisis; menghentikan proliferasi senjata pemusnah massal; dan memajukan kontrol dan pelucutan senjata, yang kedua ialah untuk menjaga kestabilan lokal dan regional yang tidak mengancam keamanan dan kesejahteraan Amerika Serikat atau sekutunya dan yang ketiga yaitu mengurangi ancaman Senjata Pemusnah Massal

(<https://www.state.gov/s/d/rm/rls/perfrpt/2002/html/18996.htm> diakses pada 8 mei 2019), dan juga hegemoni Amerika Serikat dikawasan Timur Tengah.

Bagi Israel sendiri, tujuan kerja sama ini pun untuk keamanan nasional negaranya, Israel yang berada dikawasan Timur Tengah yang berada ditengah negara-negara Arab terancam

keamanannya. Banyak pertentangan yang muncul dari negara-negara Arab terkait deklarasi berdirinya sebuah negara Israel, selain itu konflik yang tidak berkesudahan antara Israel dengan Palestina, dimana organisasi Liga Arab dengan negara-negara Arabnya mendukung Palestina dan menentang Israel, yang merupakan ancaman bagi berdiri dan berdaulatnya negara Israel.

3. Metode Penelitian

Metode dari penelitian ini adalah kualitatif. Dengan menggunakan teknik studi pustaka yaitu dengan menelaah, membaca dan memahami buku, teori, opini dan jurnal yang terkait dengan tema penelitian, serta data-data pendukung dari media internet maupun media cetak. Dengan teknik studi kepustakaan peneliti dapat mengumpulkan data sekunder yaitu dengan studi kepustakaan terkait kepentingan Amerika Serikat dalam pengakuan Yerusalem sebagai Ibukota Israel yang dapat terlihat dari kebijakan politik luar negeri dan kepentingannya terhadap Amerika Serikat sendiri.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1 kepentingan Amerika Serikat mengakui Yerusalem sebagai ibukota Israel

Pada 2016 silam, Amerika mendeklarasikan Yerusalem sebagai ibukota Israel, hal ini memicu berbagai macam reaksi dari dunia internasional dan secara tidak langsung, Amerika Serikat melanggar resolusi Majelis Dewan

Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa nomor 181 tahun 1947 dimana status Yerusalem adalah wilayah yang berada di bawah kewenangan internasional, dan diberikan status hukum dan politik yang terpisah (*separated body*). Resolusi ini juga memberikan mandat berdirinya negara Arab (Palestina) dan negara Yahudi (Israel) yang masing-masing berstatus merdeka (UN document, 'Chapter 12: The Status of Jerusalem':9).

Terdapat tiga hal utama dalam kaitan ini dengan pengakuan Yerusalem sebagai ibukota Israel, yang pertama ialah hegemoni Amerika Serikat di Timur Tengah, kelompok kepentingan di pemerintahan Amerika Serikat yaitu AIPAC/*American-Israel Public Affairs Committee* atau Komite Urusan Publik Amerika-Israel dan yang terakhir yaitu Israel.

Kepentingan pertama yaitu hegemoni AS di kawasan Timur Tengah. Timur Tengah merupakan wilayah strategis karena dilalui jalur lalu lintas perdagangan, darat dan laut, serta Timur Tengah berada pada tiga benua yaitu Asia, Afrika dan Eropa, selain itu kandungan minyak yang melimpah berada disana. Saat di Gedung Putih, Trump menyampaikan bahwa Amerika sedang menghadapi ancaman global yang sangat berbahaya, pengaruh Rusia dan kebangkitan Cina dikhawatirkan dapat mengganggu nilai-nilai liberal yang Amerika miliki, tentu saja lebih mudah untuk menyimpan sekutu di wilayah yang memiliki potensi untuk direbutkan, dimana dalam kasus ini, Israel berada di Timur Tengah. Selain itu, kawasan Timur Tengah memiliki kandungan mineral yang melimpah, seperti tembaga, batu bara, besi dan minyak yang merupakan aset terbesar kawasan ini, minyak sebagai bahan bakar

utama dan bahan mentah yang paling dibutuhkan dalam peradaban industri, 2/3 cadangan minyak dunia diperkirakan tersimpan di kawasan ini (Ruslin, 2013: 10).

Kepentingan kedua yaitu kelompok kepentingan di pemerintahan AS, yaitu AIPAC. AIPAC mempunyai keinginan kuat untuk membentuk negara Yahudi (Israel) di Palestina dengan menggunakan beragam cara baik dengan finansial maupun politik untuk mempengaruhi kebijakan luar negeri, khususnya dalam konflik Israel-Palestina dan memiliki peran yang sangat signifikan dalam hal melobi dan mempengaruhi para pembuat kebijakan luar negeri Amerika Serikat (Aprilinasari, 2013: 4).

Yang ketiga ialah Israel sendiri, hubungan bilateral yang kuat telah memperkuat kerja sama Amerika-Israel yang signifikan, termasuk bantuan militer, penjualan senjata, latihan bersama, dan pertukaran informasi, selain itu terdapat kerja sama berkala Amerika-Israel dalam mengembangkan teknologi militer, yang kemudian menjadikan Israel salah satu pengeksport senjata terbesar di seluruh dunia, Amerika Serikat pun merupakan mitra dagang terbesar Israel, menurut data dari Komisi Perdagangan Internasional, Amerika dan Israel adalah mitra dagang terbesar ke 24, dimana Amerika dan Israel telah menandatangani Perjanjian Perdagangan Bebas (FTA) pada 1985, dan semua bea cukai antara keduanya telah diiadakan.

Hal-hal tersebut diatas membuktikan, keamanan dan keberlangsungan Israel juga berpengaruh terhadap keberadaan Amerika Serikat, hal ini sesuai dengan teori kepentingan nasional dimana untuk mencapai kepentingan nasional dapat

dilakukan melalui kerja sama, seperti Amerika Serikat dengan Israel, dimana keduanya mempunyai nilai yang sama, Amerika untuk mempertahankan hegemoninya di Timur Tengah dan Israel sebagai aset strategis Amerika dan Israel untuk kelangsungan dan keamanannya serta untuk pemenuhan tanah yang dijanjikan bagi kaum Yahudi untuk memiliki tanah sendiri.

4.2 Hubungan Amerika Serikat – Israel pasca pengakuan Yerusalem sebagai ibukota Israel

Setelah pengakuan Yerusalem sebagai ibukota Israel, akhirnya pada 14 Mei kedutaan Amerika dibuka, di tengah kritik dari beberapa aktor internasional dan kekerasan pada hari yang sama di perbatasan Gaza-Israel, Gedung Putih menyatakan bahwa biayanya \$400.000 untuk memodifikasi fasilitas agar berfungsi sebagai kedutaan (Zinotti, 2018: 26).

Setelah pengakuan tersebut, pertemuan antar kedua negara sering dilakukan, upaya peningkatan berbagai kerja sama antar keduanya juga mengalami peningkatan terutama di bidang militer, *cyber*, dan teknologi. Beberapa pertemuan tersebut ialah:

1. *Joint Readout of Meeting AS-Israel* (15 Februari 2017)
2. *Readout of Meeting AS-Israel* (23 Mei 2017)
3. *Readout of Meeting AS-Israel* (18 september 2017)
4. *Readout of the Vice President's Meeting with Israeli Minister of Defense Avigdor Lieberman*

Dan masih banyak pertemuan-pertemuan lainnya yang dilakukan antar kedua negara tersebut. Dalam status

Yerusalem sendiri, pengakuan suatu negara terhadap negara lain terkait dengan eksistensi negara tersebut, jika Yerusalem dikenal sebagai ibukota Israel, ini akan berpengaruh terhadap eksistensi Israel di mata dunia, dan jika terus seperti itu, resolusi dua negara yang dikeluarkan majelis PBB tidak akan terealisasi dan upaya perdamaian antara kedua pihak yang bertikai ini tidak akan menemui kata damai.

Dalam bidang ekonomi, hubungan keduanya memang sudah baik, Amerika Serikat sebagai mitra utama Israel membangun fasilitas penelitian dan pengembangan luar negeri seperti *Intel*, *Microsoft*, dan *Apple* dan perusahaan multi-nasional berteknologi tinggi lainnya, seperti *IBM*, *Google*, *HP*, *Cisco Systems*, *Facebook* dan *Motorola* telah membuka pusat R&D di negara itu. (diakses pada 11 Juli 2019 melalui <https://tradingeconomics.com/israel/gdp>).

4.3 Reaksi dunia internasional atas pengakuan Yerusalem sebagai ibukota Israel

Setelah pengakuan Yerusalem sebagai ibukota Israel yang dilakukan Trump pada 6 Desember 2017 lalu, muncul berbagai macam reaksi dari berbagai kalangan. Protes pertama tentu saja muncul dari Bangsa Arab Palestina sendiri, gelombang protes politik terjadi di Gaza dan Tepi Barat setelah pengumuman Trump, dan Hamas menyerukan kembali intifada. Oleh karena peristiwa tersebut, DK PBB mengadakan pertemuan darurat yang menegur Israel setelah pasukannya membunuh lebih dari 60 pemrotes Palestina di perbatasan Gaza pada hari yang sama ketika Amerika Serikat membuka kedutaan besarnya di Yerusalem, dimana pada hari tersebut

menandai peringatan ke-70 berdirinya Israel, yang bagi bangsa Palestina menyebutnya dengan Nakba, atau Hari Bencana (diakses pada 11 Juli 2019 melalui <https://www.cnbc.com/2018/05/17/after-us-embassy-move-to-jerusalem-more-countries-follow-its-lead.html>).

Kedua, di tingkat regional, ketika Turki menginisiasi untuk mengadakan pertemuan tingkat tinggi dengan anggota Organisasi Kerjasama Islam pada 13 desember 2017, yang menghasilkan Deklarasi Istanbul yang berisi tentang penolakan dan kecaman terhadap keputusan sepihak Amerika Serikat, selain itu konferensi juga mengajak seluruh negara di dunia mengakui dan mendukung Yerusalem Timur sebagai ibukota Palestina (kireçci, 2018: 70).

Upaya penolakan lanjutan pun dilakukan dengan menyerahkan draft resolusi ke Dewan Keamanan PBB, juga memperingatkan semua negara anggota PBB untuk tidak memindahkan misi diplomatik mereka ke Yerusalem, draft resolusi yang dirancang Mesir tersebut diveto Amerika Serikat di Dewan Keamanan PBB. Negara-negara OKI kemudian mengajukan permohonan untuk diadakan Sidang Darurat Khusus Majelis Umum PBB (kireçci, 2018: 72).

Di skala internasional, Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa, dalam sidangnya menegaskan kembali resolusi yang relevan, termasuk resolusi 242 (1967), 338 (1973), 446 (1979), 452 (1979), 465 (1980), 476 (1980), 478 (1980), 1397 (2002), 1515 (2003), 1850 (2008), dan 2334 (2016), dipandu oleh tujuan dan prinsip-prinsip Piagam PBB, menekankan bahwa Yerusalem adalah masalah yang harus diselesaikan melalui negosiasi.

Meskipun begitu, melihat aksi yang dilakukan DK PBB, tidak menghentikan Trump untuk mencabut pengakuan tersebut, justru saat ini Trump memindahkan kedutaannya dari Tel Aviv ke Yerusalem dan mulai memodifikasi dan mendanai kedutaan Amerika di Yerusalem. Dilansir dari CNBC.com, setelah pembukaan secara resmi kedutaan Amerika Serikat di Israel pada hari Senin 14 Mei 2018, hari berikutnya, pada Rabu, Guatemala bergabung dengan Amerika Serikat untuk memindahkan kedutaannya ke Yerusalem, disusul Paraguay yang memindahkan kedutaannya dari Tel Aviv ke Yerusalem, negara-negara lain termasuk Rumania sedang mempertimbangkan langkah yang serupa, terlepas dari kontroversi seputar keputusan tersebut (diakses pada 11 Juli 2019 melalui <https://www.cnbc.com/2018/05/17/after-us-embassy-move-to-jerusalem-more-countries-follow-its-lead.html>).

5. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian pada bab-bab sebelumnya, berikut kesimpulan yang dapat peneliti sampaikan:

Pengakuan yang dilakukan Amerika Serikat terkait dengan Yerusalem sebagai ibukota Israel merupakan upaya realisasi kerja sama yang semakin dekat antar kedua negara, hal ini dilakukan terkait dengan kepemimpinan Donald Trump sebagai presiden Amerika Serikat, berbeda dengan presiden sebelumnya yaitu Barack Obama, Trump memulai hubungan yang jauh lebih erat dengan Israel, hal ini terlihat dari setelah Trump resmi menjadi presiden, negara pertama yang dikunjungi ialah Israel, pengakuan Yerusalem dan berikutnya berlanjut ke pemindahan

kedutaan Amerika untuk Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem.

Hal tersebut karena upaya pemenuhan kepentingan Amerika Serikat di Timur Tengah. Kepentingan nasional Amerika Serikat di Timur Tengah yang pertama ialah hegemoni Amerika Serikat di kawasan, Timur Tengah dikenal sebagai kawasan yang strategis karena dilalui jalur perdagangan dan berada pada tiga benua, yaitu Asia, Afrika dan Eropa serta kandungan sumber alam yang melimpah disana, selain itu, dikhawatirkan akan muncul nilai atau paham ideologi yang bertentangan dengan nilai liberalisme yang dimiliki Amerika Serikat di Timur Tengah, intervensi Rusia di berbagai konflik di Timur Tengah dan kebangkitan China yang berusaha memasuki kawasan Afrika.

Hal selanjutnya ialah kelompok kepentingan yaitu AIPAC/*American-Israel Public Affairs Committee* atau Komite Urusan Publik Amerika-Israel. AIPAC mempunyai keinginan kuat untuk membentuk negara Yahudi (Israel) di Palestina dengan menggunakan beragam cara baik dengan finansial maupun politik untuk mempengaruhi kebijakan luar negeri, khususnya dalam konflik Israel-Palestina (Aprilinasari, 2013: 4).

Terakhir adalah Israel itu sendiri, Israel sebagai aset strategis Amerika di Timur Tengah dalam upaya pencapaian hegemoni dan minyak. Selain itu, Amerika dan Israel telah memperkuat kerja sama yang signifikan, termasuk bantuan militer, penjualan senjata, latihan bersama, dan pertukaran informasi, pengembangan teknologi militer, dimana menjadikan Israel salah satu pengeksport senjata terbesar di seluruh dunia, penulis berkesimpulan lebih mudah untuk menyimpan sekutu di wilayah yang memiliki potensi untuk direbutkan.

Pengakuan akan Yerusalem sebagai ibukota Israel pun menimbulkan berbagai reaksi, muncul konflik baru di jalur Gaza ketika peresmian kedutaan Amerika yang pindah dari Tel Aviv ke Yerusalem, reaksi dari Organisasi Kerja Sama Islam dan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), hal ini menambah konflik perebutan kota tersebut semakin rumit. Yerusalem berada dibawah status hukum internasional, resolusi Majelis Umum PBB nomor 181 (1947) yang berada di bawah kewenangan internasional, berstatus hukum dan politik yang terpisah, serta memberikan mandat berdirinya negara Arab (Palestina) dan negara Yahudi (Israel) yang masing-masing berstatus merdeka (UN document, 'Chapter 12: The Status of Jerusalem':9), hal ini berarti bahwa Amerika telah melanggar resolusi tersebut, ketika DK PBB mengadakan sidang darurat khusus majelis umum PBB dan menghasilkan resolusi untuk membatalkan pengakuan tersebut, Duta Besar Amerika untuk PBB, Nikki Haley, mengatakan draf resolusi tersebut merupakan penghinaan, dan Trump bereaksi dengan mengancam akan memotong bantuan ke negara mana pun yang memberikan suara menentang Amerika Serikat.

Dalam hal ini, penggunaan hak veto Amerika Serikat dalam PBB setengahnya digunakan untuk melindungi Israel, tercatat total 83 kali hak veto yang digunakan oleh Amerika Serikat, sebanyak 43 kali digunakan untuk melindungi Israel dari resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa, hal ini membuktikan bahwa kedua negara tersebut tidak dapat dipisahkan, dan keduanya saling memenuhi kepentingan satu sama lain.

Bagaimanapun, pengakuan tersebut berpengaruh dalam perpolitikan internasional dan membuat masalah baru terhadap solusi antar Israel dan Palestina, hari ini media bahkan mengetahui Yerusalem sebagai ibukota Israel, dan beberapa negara lainnya telah memindahkan kedutaan mereka dari Tel Aviv ke Yerusalem, seperti yang dilakukan Guatemala, serta menjadi pertimbangan negara lain seperti Paraguay dan Rumania untuk melakukan hal serupa.

Terakhir, penulis berkesimpulan bahwa pengakuan dari negara lain terhadap negara lainnya berpengaruh terhadap eksistensi suatu negara dalam hubungan internasional. Eksistensi, keamanan dan keberlangsungan hidup merupakan tujuan yang ingin dicapai setiap negara. Konflik antar Israel dan Palestina adalah upaya masing-masing pihak yang bersengketa untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut diatas, konflik yang telah lama dan selalu menghasilkan banyak korban belum menemui kata damai hingga hari ini, pengakuan Yerusalem tersebut pun menambah konflik baru dan rumit bagi keduanya, tidak hanya bagi Israel dan Palestina, namun juga berpengaruh terhadap kawasan dan dunia internasional, konflik paling sensitif dan kompleks di Timur Tengah.

5.2 Saran

Sebagai bagian terakhir dalam penelitian ini, maka peneliti memberikan saran-saran sebagai berikut:

dari sisi substansial, Amerika Serikat sebagai salah satu anggota Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan aktor yang dipercaya untuk menjadi penengah dalam konflik Israel – Palestina tetap berpegang pada resolusi nomor 181 (1947) bahwa Yerusalem berada di bawah kewenangan internasional, berstatus hukum dan politik yang terpisah, serta memberikan mandat berdirinya negara Arab (Palestina) dan negara Yahudi (Israel) yang masing-masing berstatus merdeka dan memindahkan kembali kedutaan Amerika Serikat ke Tel Aviv. Kerja sama antar Amerika dan Israel tetap dapat dilakukan tanpa menimbulkan konflik baru dengan adanya pengakuan tersebut, karena saat ini Amerika dan Israel tengah membangun kemitraan strategis dengan Arab Saudi terkait program nuklir Iran.

Dari sisi metodologis, bagi mahasiswa yang berminat untuk mendalami masalah kepentingan Amerika Serikat dalam pengakuan Yerusalem sebagai ibukota Israel, diharapkan dapat mengkajinya dari permasalahan yang berbeda seperti membahas kepentingan Organisasi Kerja Sama Islam yang menolak secara keras pengakuan tersebut sehingga nantinya akan memperluas wawasan pengetahuan bagi yang akan membahas penelitian-penelitian sejenis ataupun orang-orang yang memerlukanya.

Peneliti menyadari dalam pembahasan penelitian ini referensi yang terkait dengan objek penelitian secara langsung masih sangat kurang, terutama data primer dari informan yang ahli dalam isu Timur Tengah. Peneliti berharap bagi yang akan mengkaji permasalahan ini lebih lanjut dapat melakukan wawancara kepada para ahli terkait penelitian ini untuk menjaga keobjektifan isi penelitian.

Daftar Pustaka

Buku

- A.A, Perwita. dan Y. M., Yani. 2014. Pengantar Ilmu Hubungan Internasional cetakan keempat. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Beack, Lousie. 2008. The new Foreign Policy: Power Seeking in a Globalized Era. 2nd ed. London : Penerbit Rowman dan Littlefield.
- Bush to Donald Trump. Palgrave Mcmillan : Switzerland.
- Carr, E. H. 1983. The Twenty Years' Crisis 1919–1939: An Introduction to the Study of International Relations. Basingstoke, UK : Palgrave Macmillan.
- Darmayadi, Andrias dkk. 2015. Mengenal Studi Hubungan Internasional. Bandung: Penerbit Zavara.
- Fawcett, Louise. 2009. International Relations of the Middle East. England, UK: Oxford University Press Inc.
- Goldstein, Joshua dan Pevehouse, Jon. 2012. International Relations. United States: Pearson Education Inc.
- Holsti, K.J. 1988. Politik Internasional, Kerangka Untuk Analisis, Jilid II, Terjemahan M. Tahrir Azhari. Jakarta: Erlangga.
- Jackson, Robert dan George Sorensen. 2010. Introduction to International Relations: Theories & Approaches. England, UK: Oxford University Press Inc.
- Jackson, Robert dan George Sorensen. 2012. Introduction to International Relations: Theories & Approaches, Fifth Edition. England, UK: Oxford University Press Inc.
- Manheim, Jarol B. 1990. Strategic Public Diplomacy : The Evolution of Influence. New York : Oxford University Press.
- Nazir, Moh. 2014. Metode Penelitian. Bogor : Penerbit Ghalia Indonesia.
- Nye, Joseph S dan David A. Welch. 2013. Understanding Global Conflict and Cooperation: an Introduction to Theory and History, Ninth Edition. United States of America : Pearson Education Inc.
- Powaski, Ronald E. 2019. Ideals, Interest and U.S Foreign Policy from George H.W
- Russett, Bruce., Harvey Starr, David Kinsella. 2010. World Politics The Menu for Choice, Wadsworth: Cengage Learning.
- Sefriani, 2011. Buku hukum internasional suatu pengantar. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Starke, J.G. 2010. Pengantar Hukum Internasional. Jakarta : Sinar Grafika.
- Yani, Yanyan Mochamad dkk. 2017. Pengantar Studi Keamanan. Malang : Intrans Publishing.

Karya Tulis Ilmiah:

- Aprilinasari, Murlita. 2013. Strategi AIPAC (American-Israel Public Affairs Committee) terhadap Kebijakan Luar Negeri AS Era George Walker Bush terkait Konflik Israel dan Palestina[skripsi]. Malang: jurusan Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Malang.

- Bidara, Melita Angelin dkk. 2018. Kepentingan Amerika Serikat dalam Konflik Laut Cina Selatan. Eksekutif : Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan volume 1 nomor 1:1-4.
- Hamdi, Ossama Anter. 2018. American Foreign Policy Toward the Arab – Israel Conflict: Strategic Transformation, Insight Turkey vol. 20 no 02/2018, pp. 251-271. Cairo University, Egypt.
- Kirecci, M. Arif. 2018. Turkey's Leadership in Yerusalem Crisis, Insight Turkey vol. 20/no 1 2018, pp. 67-78. Bilkent University, Turkey.
- Kurniawan, Imam. 2011. Kepentingan Amerika Serikat dalam Invasi Irak tahun 2003[skripsi]. Malang: Jurusan Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Malang.
- Pengembangan Nuklir Iran. Fisip UI : Jakarta.
- Policy, Journal Compilation, Middle East Policy Council.
- Ruslin, Ismah Tita. 2013. Memetakan konflik di Timur Tengah: Jurnal Politik Profetik volume 1 nomor 1 tahun 2013. UIN Alauddin Makassar.
- Sangga, T. Zulman. 2017. Tinjauan Yuridis terhadap Penggunaan Hak Veto Amerika Serikat Sebagai Anggota Tetap Dewan keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (studi kasus konflik israel-palestina)[thesis]. Banda Aceh: Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala.
- Thompson, Jack. 2018. Trump's Middle East Policy. CSS Analysis in Security Policy no. 233 ETH Zurich.
- Triwahyuni, Dewi. 2011. Signifikansi Kawasan Asia Tenggara dalam Kepentingan Amerika Serikat. Majalah Ilmiah Unikom volume 9 nomor 1:33-39.
- Walt, Stephen M & Jhon J. Mear Sheimer. 2006. The Israel Lobby and U.S foreign
- Winingsih, Sri. 2009. Kebijakan Luar negeri Amerika Serikat terhadap Program
- Zanotti, Jim. 2018. Israel: Background and U.S Relations, Congressional Research Service 7-5700.
- Dokumen:**
- The Commission on America's National Interest. 2010. U.S National Interest.
- The White House. 2017. National Security Strategy of the United States.
- U.S Government. 2019. Branches of the U.S. Government.
- U.S. Department of State. 1987. Dictionary of International Relations Terms.
- United Nations. 1997. The Status Of Jerusalem.
- UNOCHA.2019. Protection of Civilians report.
- Rujukan Elektronik:**
- Aco, Hasanudin. 2017. Mengapa Kota Yerusalem Sangat Penting Bagi Umat Islam, Kristen dan Yahudi? <http://www.tribunnews.com/internasional/2017/12/07/mengapa-kota-yerusalem-sangat-penting-bagi-umat-islam-kristen-dan-yahudi> [27/02/2019].

- AIPAC. 2019. America's Pro Israel Lobby. <https://www.aipac.org/about-aipac/mission>[29/06/2019]
- Bhakti, Ikrar Nusa. 2009. Obama dan Politik Luar Negeri AS melalui Constitutional Rights Foundation. 2019. War and International Law America's Foreign Policy: A Brief History. <https://www.crf-usa.org/war-in-iraq/foreign-policy.html>[29/06/2019]
- Cordesman , Anthony H. 2017. The Strategic Impact of Making Jerusalem the Capital of Israel. <https://www.csis.org/analysis/strategic-impact-making-jerusalem-capital-israel>[02/05/2019]
- Crishtiasuti, Novi. 2017. Akui Yerusalem Ibu Kota Israel, Trump Penuhi Janji Kampanye. <https://news.detik.com/internasional/3759255/akui-yerusalem-ibu-kota-israel-trump-penuhi-janji-kampanye>[25/03/2019]
- Ferida, Khairisa. 2017. Berapa Kali AS Gunakan Hak Veto untuk Bela Israel? Ini <https://www.liputan6.com/global/read/3202038/berapa-kali-as-gunakan-hak-veto-untuk-bela-israel-ini-jawabannya>[05/04/2019].
- Hasugian, Maria Rita. 2017. Begini Sejarah Perebutan Yerusalem Sejak Ribuan Tahun Lalu. Melalui <https://dunia.tempo.co/read/1043200/begini-sejarah-perebutan-yerusalem-sejak-ribuan-tahun-lalu>[01/03/2019].
- <https://www.aljazeera.com/archive/2003/12/20084916191675293.html>[25/03/2019].
- Inbar, Efraim & Gershon Hacohen. 2017. The Strategic Importance of Jerusalem. <https://jiss.org.il/en/the-strategic-importance-of-jerusalem/> [02/05/2019]
- Institute for Contemporary Affairs. 2017. Ten Reasons for Recognizing Jerusalem as the Capital of Israel. <http://jcpa.org/article/ten-reasons-recognizing-jerusalem-capital-israel/>[05/08/2019]
- Ita. 2017. 3 Hal Soal Yerusalem, Kota Penting Bagi Umat Kristen, Islam dan Yahudi. Melalui <https://news.detik.com/bbc-world/d-3759413/3-hal-soal-yerusalem-kota-penting-bagi-umat-kristen-islam-dan-yahudi>[04/03/2019].
- Jerusalem Guide. The Western Wall in Jerusalem. A place of prayer for all nations. Melalui <https://www.jerusalem-insiders-guide.com/western-wall-in-jerusalem.html> [07/03/2019]
- lipi.go.id/berita/Obama-dan-politik-luar-negeri-AS/4245
- Liputan6. 2019. AS Gabung Konsulat Palestina dengan Kedutaan di Israel, Ramallah Murka. melalui <https://www.liputan6.com/global/read/3909271/as-gabung-konsulat-palestina-dengan-kedutaan-di-israel-ramallah-murka> [05/03/2019]
- Muhaimin. 2017. AS-Israel Kalah Telak soal Yerusalem di PBB, Begini Reaksi Dunia. melalui <https://international.sindonews.com/read/1268042/40/as-israel-kalah-telak-soal-yerusalem-di-pbb-begini-reaksi-dunia-1513927727>[01/03/2019].
- Open Secret: Center for Responsive Politics. 2019. Pro-Israel.

- <https://www.opensecrets.org/industries/indus.php?ind=q05>
- Reagan, David R. 2019. Christian Zionism. [https://christinprophecy.org/articles/christian-zionism/\[19/07/2019\]](https://christinprophecy.org/articles/christian-zionism/[19/07/2019])
- State Israel. Balfour Declaration melalui <https://www.bl.uk/press/search?q=balfour+declaration> [05/04/2019]
- State Israel. Partition Plan. Melalui <https://mfa.gov.il/mfa/aboutisrael/maps/pages/1947%20un%20partition%20plan.aspx> [05/04/2019]
- The Guardian. 2019. Pro-Israel donors spent over \$22m on lobbying and contributions in 2018. [https://www.theguardian.com/us-news/2019/feb/15/pro-israel-donors-spent-over-22m-on-lobbying-and-contributions-in-2018\[19/07/2019\]](https://www.theguardian.com/us-news/2019/feb/15/pro-israel-donors-spent-over-22m-on-lobbying-and-contributions-in-2018[19/07/2019])
- Tribunnews.com. 2017. Mengapa Kota Yerusalem sangat Penting Bagi Umat Islam, Kristen dan Yahudi. Melalui <http://www.tribunnews.com/internasional/2017/12/07/mengapa-kota-yerusalem-sangat-penting-bagi-umat-islam-kristen-dan-yahudi> [07/02/2019]
- U.S Department of State. 2019. U.S Relations with Israel. [https://www.state.gov/\[25/03/2019\]](https://www.state.gov/[25/03/2019])
- U.S Embassy in Israel. 2019. Fact Sheet U.S. – Israel Economic Relationship. [https://il.usembassy.gov/our-relationship/policy-history/fact-sheet-u-s-israel-economic-relationship/\[19/07/2019\]](https://il.usembassy.gov/our-relationship/policy-history/fact-sheet-u-s-israel-economic-relationship/[19/07/2019])
- U.S Embassy in Israel. 2019. Policy and History. [https://il.usembassy.gov/our-relationship/policy-history/\[19/07/2019\]](https://il.usembassy.gov/our-relationship/policy-history/[19/07/2019])
- U.S Energy Information and Administration. 2019. How much oil is consumed in the United States? Melalui [https://www.eia.gov/tools/faqs/faq.php?id=33&t=6\[18/07/2019\]](https://www.eia.gov/tools/faqs/faq.php?id=33&t=6[18/07/2019]).
- United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs. 2019. Palestinians and Israelis Injured. <https://www.unocha.org> [30/03/2019].